

**PENERBITAN AKTA KELAHIRAN UNTUK MEWUJUDKAN TERTIB
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KOTA PADANG**

(Mira Handayani, 0810111039, Fakultas Hukum Unand, halaman 69, 2013)

ABSTRAK

Pencatatan dan penerbitan akta kelahiran merupakan bagian dari pelayanan publik. Akta merupakan salah satu dokumen terpenting karena menjadi bukti pengakuan legal kewarganegaraan seseorang, seperti yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Setiap orang harus mempunyai akta sebagai jaminan atas kedudukan dan status hukum seseorang dalam negara. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pelayanan administratif yang mengurus tentang kependudukan dan catatan sipil. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah serta Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Padang, dengan berpedoman ke Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan. Namun sampai saat ini tingkat kesadaran masyarakat untuk membuat akta kelahiran masih rendah. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah karena kurangnya pengetahuan mereka akan arti pentingnya pemilikan akta kelahiran tersebut, kemudian adanya keluhan dari masyarakat mengenai data kependudukannya yang belum tertib dan lengkap, serta juga disebabkan oleh faktor intern khususnya menyangkut kemampuan birokrasi dalam menyampaikan pelayanan, prosedur dan persyaratan serta standarisasi waktu dalam pembuatan akta kelahiran. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka yang menjadi permasalahan yang penulis teliti adalah 1) Bagaimana Proses Penerbitan Akta Kelahiran Untuk Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan di Kota Padang. 2) Apa Kendala yang Dihadapi Pemerintah Dalam Penerbitan Akta Kelahiran Untuk Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan di Kota Padang. Untuk menjawab permasalahan di atas penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian hukum yuridis sosiologis atau penelitian hukum yang menitikberatkan pada penelitian lapangan untuk mendapatkan data primer, disamping itu juga dilakukan penelitian terhadap data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan hukum. Sifat dari penelitian ini yaitu bersifat deskriptif yang menggambarkan secara luas mengenai proses penerbitan dan kendala dalam penerbitan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang. Dari data primer dan data sekunder yang dikumpulkan, kemudian diolah dengan proses coding, editing dan tabulasi sehingga menghasilkan penulisan data yang sederhana dan mudah dimengerti. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan sehingga diperoleh kesimpulan bahwa 1) Prosedur penerbitan akta kelahiran untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan di kota Padang secara umum sesuai dengan prosedur yang ditentukan, 2) Kendala-kendala dalam penerbitan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Padang meliputi kendala eksternal, yaitu dari masyarakat dan internal meliputi pegawai/petugas, sarana dan prasarana pemerintah. Berdasarkan hal di tersebut Hendaknya pemerintah melakukan sosialisasi langsung dan merata untuk meningkatkan kesadaran dan peran serta penduduk dalam melakukan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta mengenai sanksi administratif/tindak pidana kemudian juga harus diberikan *reward* kepada aparatur dan penduduk yang menjalankan ketentuan secara disiplin, meningkatkan Kuantitas/kualitas SDM dengan menambah jumlah SDM dan meningkatkan pelatihan dengan menyelenggarakan kegiatan pelatihan tenaga operator SIAK dan ada komitmen bersama mengenai Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang dituangkan dalam Perda dengan pemyempurnaan sistem SIAK itu sendiri.